



**PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TAHUN 2021

**Nomor : S-235/PW14/6/2021
Tanggal: 26 Februari 2021**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikdik Sadikin
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001



Pihak Pertama,

Dikdik Sadikin
NIP 19650220 198603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (Juta)	201
	1.2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	334
	1.3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	186.779
	1.4	Nilai penyelamatan keuangan Negara Negara dan Daerah	Rupiah (Juta)	40.679
	1.5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	Rupiah (Juta)	118
	1.6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	Rupiah (Juta)	59
2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah Program Prioritas (PP) yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	2
	2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi	Kegiatan Prioritas	7
	2.3	Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	7
	2.4	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional	0
	2.5	Jumlah Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah yang Tercapai Sesuai Target	Program Lintas Sektor	1
	2.6	Persentase Desa yang di Audit Kinerja dengan Hasil Baik	Persen	25
	2.7	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	80
	2.8	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persen	70
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	0
	3.2	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	0
	3.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	6
	3.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2
	3.5	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDEs	2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	75
		4.3 Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	0
		4.4 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	0
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Pemda	12
		5.2 Jumlah Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	12
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	0
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemkab/Kota	3
		5.5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	0,18
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	42,00
		5.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	41,00
		5.9 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	3
		5.10 Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	0
		5.11 Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	0
		5.12 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	1
		5.13 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BUMD	0
		5.14 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3	BLUD	0
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	76
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
		6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
		6.4 Persentase Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	87
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	91
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	100
		6.8 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor	Baik

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
	6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	81
	6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level	Level 3
	6.11 Indeks MR Unit Kerja	Level	0
	6.12 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Skor	76
	6.13 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Skor	73

- Kegiatan
1. Pengawasan Pembangunan di seluruh Perwakilan
 2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP
- Jumlah

Anggaran	
Rp.	935.916.000,00
Rp.	20.226.727.000,00
Rp.	<u>21.162.643.000,00</u>

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 15 Februari 2021
Kepala Perwakilan,

Dikdik Sadikin
NIP 19650220 198603 1 001